

BUKU I - RINGKASAN EKSEKUTIF
DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
(SLHD) KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



**PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH**

Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) disusun sebagai bentuk penyediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan akuntabel mengenai kondisi, permasalahan, serta pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Dokumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan terukur terkait isu-isu prioritas lingkungan hidup di Kota Pontianak, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan para pemangku kepentingan secara partisipatif. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 telah disusun dengan memuat isu prioritas daerah yang ditetapkan melalui proses partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Adapun isu prioritas lingkungan hidup Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi:

- (1) Pengelolaan Sampah Perkotaan;
- (2) Penurunan Kualitas Air Permukaan;
- (3) Genangan Air Perkotaan

Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pontianak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, April 2026

Wali Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.



PERNYATAAN MENGENAI INOVASI DAERAH

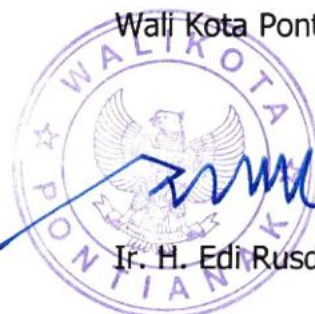
Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 telah memuat dan mengakomodasi inovasi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh inovasi yang dicantumkan dalam Dokumen SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 telah disusun berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh inovasi yang dicantumkan dalam Dokumen SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 telah disusun berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Pontianak:

1. GALAH BUNG SAM (Gerakan Memilah dan Menabung Sampah) di Sekolah
2. Memilah Sampah Menabung Emas
3. SI GITA JAS BERKERAH (Sistem Digital Jasa Angkutan Sampah dari Sumber yang Keren dan Ramah)
4. SIPEKA (Sistem Pemantauan Kualitas Air)
5. Hutan Sekolah

Demikian Surat Pernyataan mengenai Inovasi Daerah Kota Pontianak dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, April 2026

Wali Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Aliyanyang Nomor 7D Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telp. (0561) 8171726
Laman www.dlh.pontianak.go.id

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. SY. Usmulyono, M.T.

NIP : 196710171997031002

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Menyatakan bahwa seluruh data yang disajikan dalam Dokumen Status Lingkungan Hidup (SLHD) Kota Pontianak tahun 2026 merupakan data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, April 2026

Mengetahui,

Wali Kota Pontianak

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.



Ir. SY. Usmulyono, M.T.

KATA PENGANTAR



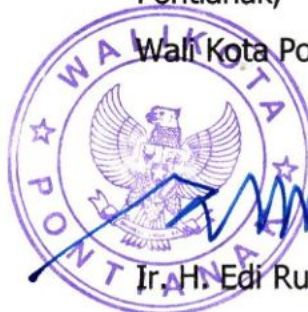
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 dapat disusun dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 disusun sebagai sarana penyediaan informasi mengenai kondisi, permasalahan, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak. Dokumen ini juga berisikan isu prioritas di Kota Pontianak Tahun 2025 beserta inovasi dan regulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk menangani isu tersebut demi meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Pontianak.

Data-data yang disajikan dalam dokumen ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Dokumen ini diharapkan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyampaian informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Semoga adanya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 dapat memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Pontianak.

Pontianak, April 2026

Wali Kota Pontianak



Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T.

RINGKASAN EKSEKUTIF

(RINGKASAN TABEL DPSIR DAN TABEL ISU PRIORITAS)

Buku I Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Pontianak Tahun 2026 disusun sebagai ringkasan dari Buku II, khususnya Bab II Analisis Isu Lingkungan Hidup Daerah. Dokumen ini memuat informasi pokok mengenai kondisi pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disajikan secara singkat, sistematis, dan terstruktur untuk memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara faktor pendorong, tekanan, kondisi lingkungan, dampak, serta respons pengelolaan lingkungan hidup daerah. Penyusunan Buku I ini dimaksudkan untuk menghadirkan informasi kunci yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami kondisi lingkungan hidup Kota Pontianak sekaligus menjadi bahan pendukung dalam proses perumusan kebijakan, evaluasi, dan penentuan arah intervensi pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Sesuai dengan format penyusunannya, Buku I SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 disajikan dalam bentuk tabel ringkasan yang memuat substansi utama pada setiap isu prioritas lingkungan hidup daerah. Penyajian tersebut dilakukan agar informasi penting mengenai komponen *Driving Force*, *Pressure*, *State*, *Impact*, dan *Response* (DPSIR) dapat ditampilkan secara lebih ringkas, jelas, dan mudah ditelusuri keterkaitannya. Melalui bentuk penyajian tersebut, Buku I tidak hanya berfungsi sebagai dokumen ringkasan, tetapi juga sebagai media untuk memperlihatkan pola hubungan sebab-akibat antar komponen lingkungan hidup serta gambaran awal mengenai kebutuhan penanganan dan penguatan respons dalam pengelolaan lingkungan hidup daerah.

Adapun matra lingkungan hidup yang dibahas dalam Buku I SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 meliputi matra:

1. Keanekaragaman Hayati
2. Kualitas Air

3. Laut, Pesisir, dan Pantai
4. Kualitas Udara
5. Lahan dan Hutan
6. Pengelolaan Sampah dan Limbah
7. Perubahan Iklim
8. Resiko Bencana

Sedangkan untuk isu prioritas lingkungan hidup Kota Pontianak yang telah ditetapkan yaitu:

1. Pengelolaan Sampah Perkotaan,
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan, dan
3. Genangan Air Perkotaan.

Isu prioritas tersebut dipilih karena merepresentasikan permasalahan lingkungan hidup yang menonjol dan memiliki keterkaitan erat dengan karakteristik fisik wilayah, perkembangan kawasan perkotaan, intensitas aktivitas masyarakat, serta tantangan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pontianak. Pembahasan pada masing-masing matra diarahkan untuk menunjukkan kondisi aktual lingkungan hidup daerah, faktor-faktor yang memengaruhi, dampak yang ditimbulkan, serta bentuk respons yang telah dilaksanakan dan yang masih perlu diperkuat. Dengan demikian, Buku I SLHD Kota Pontianak Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi dokumen ringkas yang informatif dan relevan dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup daerah yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

1.1 Tabel Ringkasan DPSIR Matra Lingkungan Hidup**1.1.1 Keanekaragaman Hayati**

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kebutuhan Ruang - Subbab 2.1, Tabel 2.1 (Hal. II-5)	1) Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Pemukiman - Subbab 2.1, Tabel 2.4 (Hal. II-9)	1) Kondisi Keanekaragaman Hayati Kalbar, 2025 - Subbab 2.1, Tabel 2.6 (Hal. II-11)	1) Berkurangnya ruang hidup flora dan fauna
2) Pertumbuhan Ekonomi Memperluas Kawasan Terbangun - Subbab 2.1, Tabel 2.2, Tabel 2.3, (Hal. II-7)	2) Fluktuasi Nilai Indeks Kinerja Tutupan Lahan - Subbab 2.1, Tabel 2.5 (Hal. II-10)	2) Kondisi Keanekaragaman Hayati Komoditas Hayati Perkotaan (Buah) Kota Pontianak, 2025 - Subbab 2.1, Gambar 2.2, Gambar 2.3 (Hal. II-12 sd. 13)	2) Penurunan kualitas tutupan lahan pada Tabel 2.5
		3) Kondisi Komponen Hayati Komoditas Ternak Kota Pontianak, 2025 - Subbab 2.1, Gambar 2.4 (Hal. II-14)	3) Keterbatasan RTH dan Vegetasi
			4) Menurunnya kemampuan lingkungan terhadap suhu mikro perkotaan, menyerap air hujan, menjaga kualitas udara, dan kenyamanan lingkungan
			5) Melemahnya fungsi ekologis lingkungan riparian dan ekosistem lokal

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

		4) Keanekaragaman Hayati Komoditas Budidaya Kota Pontianak, 2025 - Subbab 2.1, Gambar 2.5, (Hal. II-15)	
<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah - Melaksanakan Kegiatan Adiwiyata di Lingkungan Sekolah Kota Pontianak. - Melaksanakan kegiatan pembinaan rutin anggota Saka Kalpataru dalam pelaksanaan 3	1) Pengelolaan Kawasan Lindung Perda Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013–2033, pengembangan kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan sempadan sungai. - Subbab 2.1 (Hal. II-19)	1) Pengembangan dan Pengelolaan Taman Kehati - Subbab 2.1, Tabel 2.9 (Hal. II-22)	1) Program Penghijauan dan Reboisasi Kota Pontianak - Subbab 2.1, Tabel 2.7 (Hal II-19) 2) Pengembangan RTH (RTH Publik dan RTH Privat) - Subbab 2.1 (Hal II-20)

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

(tiga) Krida yaitu Krida 3R, Krida Perubahan Iklim dan Krida Keanekaragaman Hayati. - Kegiatan <i>Earth Hour</i>. 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup - Sosialisasi Pelaksanaan Sekolah Adiwiyata bagi SD dan SMP Swasta di Kota Pontianak. - Sosialisasi Konsep Baru Adipura. - <i>FGD</i> Kolaborasi Pemerintah dan Penggiat Lingkungan di Kota Pontianak.	2) Pengelolaan Kawasan Budidaya Kawasan budidaya di Kota Pontianak diarahkan sesuai RTRW 2013–2033 dengan peruntukan lahan pertanian sekitar 49,9%, kawasan permukiman 34,2%, dan 15,9% untuk fasilitas pendukung dan infrastruktur lainnya. - Subbab 2.1 (Hal. II-20)		
--	--	--	--

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

- Subbab 2.1 (Hal. II-16 sd. 18)			
----------------------------------	--	--	--

1.1.2 Kualitas Air

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Timbulan Limbah Cair - Subbab 2.2, Tabel 2.10, Gambar 2.6 (Hal II-25) 2) Pertumbuhan Ekonomi Menambah Beban Pencemar Sektor Usaha/Jasa - Subbab 2.1, Tabel 2.11, Tabel 2.12 (Hal II-27)	1) Keterbatasan Sumber Air Bersih - Subbab 2.2, Tabel 2.13 (Hal II-29) 2) Limpasan Air Hujan dari Kawasan Terbangun 3) Limbah Cair Industri dan Budidaya Pertanian - Subbab 2.2 (Hal II-29)	1) Nilai Indeks Kualitas Air di Kota Pontianak - Subbab 2.2, Tabel 2.14 (Hal II-30), Gambar 2.10 (Hal II-31) 2) Data Kualitas Air Sungai di Kota Pontianak - Subbab 2.2, Tabel 2.15 (Hal II-32)	1) Penurunan mutu air menyebabkan berkurangnya kualitas biota perairan 2) Penurunan visual dan kenyamanan lingkungan akibat adanya pencemaran air - Subbab 2.2 (Hal II-31) 3) Potensi genangan air karena sumbatan sampah dan limbah dalam saluran air/drainase 4) Kondisi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan vektor penyakit terutama penyakit yang berkaitan dengan air dan sanitasi lingkungan

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

			- Subbab 2.2, Tabel 2.16 (Hal II-34)
<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Pemasangan banner/spanduk/baliho untuk larangan membuang sampah di lahan kosong/saluran/parit/sungai 2) Melaksanakan program sanimas dan kotaku dalam pembangunan IPAL Komunal skala permukiman dan kawasan 3) Memberikan sosialisasi atau kampanye keliling di sepanjang bantaran Sungai Kapuas - Subbab 2.2 (Hal II-38)	1) Melakukan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota berupa penghentian sumber pencemaran, pembersihan unsur pencemar dan pemulihan lingkungan terkontaminasi LB3 2) Memberikan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan untuk kegiatan usaha	1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media khususnya media air, udara dan laut - Kegiatan pemantauan kualitas air permukaan menggunakan alat pemantauan air (WQMS dan Onimo) di 3 Lokasi (Intake PDAM, Sungai Jawi dan taman Alun Kapuas)	1) Penataan turap di lokasi drainase wilayah Kota Pontianak 2) Kegiatan normalisasi parit dan sungai yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 3) Program pengendalian sungai dan parit dilakukan pembangunan dan penataan waterfront city di sepanjang bantaran Sungai Kapuas. - Subbab 2.2 (Hal II-38)

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

	- Subbab 2.2, Gambar 2.15, Gambar 2.16 (Hal II-37)	- Aksi Jumat Bersih yaitu kegiatan bersih parit yang melibatkan OPD, Masyarakat, dan Kegiatan Usaha 2) Pemberian informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat melalui aplikasi SIPEKA (Sistem Pemantauan Kualitas Air) - Subbab 2.2, Gambar 2.11, Gambar 2.12. Gambar 2.13 (Hal II-36 sd. II-37)	
--	--	--	--

1.1.3 Laut, Pesisir, dan Pantai

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kebutuhan Air Bersih - Subbab 2.3, Gambar 2.17 (Hal II-39)	1) Limbah Rumah Tangga dan Kegiatan Usaha di Sempadan Sungai 2) Perubahan Penggunaan Lahan - Subbab 2.3, Tabel 2.17 (Hal II-41)	1) Indikator tidak relevan dengan kondisi wilayah Kota Pontianak yang tidak memiliki laut dan pantai 2) Kondisi Indeks Kualitas Air di Kota Pontianak - Subbab 2.3, Tabel 2.18, Gambar 2.18 (Hal II-42) 3) Kondisi Kualitas Air Permukaan di Kota Pontianak dilihat dari parameter BOD, COD, dan TSS yang menunjukkan tingkat beban pencemar yang masuk ke badan air utama. - Subbab 2.3, Gambar 2.17 (Hal II-39)	1) Kualitas air sungai pada Tabel 2.19 berpotensi membawa beban pencemar ke wilayah estuari dan laut melalui aliran Sungai Kapuas dan Sungai Landak 2) Berpotensi membawa beban pencemar ke wilayah estuari dan laut melalui aliran Sungai Kapuas dan Sungai Landak 3) Akumulasi sedimen dan limbah dari wilayah kota dapat mempengaruhi kualitas perairan hilir meskipun dampak akhirnya berada di luar administrasi Kota Pontianak 4) Potensi pencemaran tersebut dapat berdampak pada habitat biota perairan,

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

			kekeruhan air, dan menurunnya kualitas ekosistem muara - Subbab 2.3 (Hal II-44)
<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Edukasi kepada masyarakat di sepanjang bantaran sungai perlu diperkuat agar pengelolaan lingkungan di tingkat lokal dapat mendukung kualitas perairan secara regional - Subbab 2.3 (Hal II-45)	1) Peningkatan sanitasi masyarakat dan pengurangan limpasan pencemar dari kawasan terbangun merupakan langkah utama untuk menekan beban pencemaran menuju hilir. - Subbab 2.3 (Hal II-45)	-	1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha perlu diarahkan untuk memastikan memiliki sistem pengolahan limbah sehingga limbah tidak dibuang ke badan air tanpa pengelolaan yang memadai. - Subbab 2.3 (Hal II-45)

1.1.4 Kualitas Udara

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kebutuhan Transportasi - Subbab 2.4, Gambar 2.19 (Hal II-46)	1) Penggunaan Bahan Bakar Sektor Industri - Subbab 2.4, Gambar 2.2 (Hal II-48)	1) Kondisi Kualitas Udara Ambien Kota Pontianak - Subbab 2.4, Tabel 2.22 (Hal II-49)	1) Terjadi pemanasan global dan peningkatan suhu udara perkotaan. - Subbab 2.4, Tabel 2.24 (Hal II-52)
2) Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Penggunaan Kendaraan Bermotor - Subbab 2.4, Tabel 2.2 (Hal II-47)	2) Pembangunan Fisik dan Infrastruktur Kota - Subbab 2.4 (Hal II-48)	2) Indeks Kualitas Udara Kota Pontianak - Subbab 2.4, Tabel 2.23, Gambar 2.21 (Hal II-51)	2) Curah hujan cukup tinggi dengan intensitas yang tidak menentu - Subbab 2.4, Tabel 2.25 (Hal II-52)
3) Adanya Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan - Subbab 2.4 (Hal II-47)	3) Perluasan Jaringan Jalan Menambah Intensitas dan Mobilitas Kendaraan - Subbab 2.4, Tabel 2.21 (Hal II-48)		3) Penurunan kualitas udara tercatat dalam pemantauan AQMS dalam kategori “Tidak Sehat” akibat kabut asap. - Subbab 2.4, Gambar 2.22 (Hal II-54)
			4) Penurunan kualitas udara dapat menimbulkan penurunan kesehatan masyarakat akibat gangguan pernapasan - Subbab 2.4, Tabel 2.26 (Hal II-55)

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Sosialisasi dan Kampanye Lingkungan: Kolaborasi untuk Udara Lebih Bersih di Pontianak - Subbab 2.4 (Hal II-57) 2) Pelaksanaan Kegiatan Uji Emisi - Subbab 2.4, Gambar 2.25 (Hal II-59)	1) Memberikan fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH untuk Kegiatan Usaha - Subbab 2.4 (Hal II-56) 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan usaha - Subbab 2.4, Gambar 2.24 (Hal II-57)	1) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan, khususnya terhadap media udara - Pemantauan dengan metode <i>passive sampler</i> - Pemantauan dengan alat AQMS - Subbab 2.4, Gambar 2.23 (Hal II-56)	1) Program Penghijauan Dan Peningkatan Ruang Terbuka Hijau - Subbab 2.4, Tabel 2.27 (Hal II-58) 2) Pelaksanaan <i>Car Free Day</i> - Subbab 2.4 (Hal II-58)

1.1.5 Lahan dan Hutan

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Mendiring Pemanfaatan Lahan Secara Intensif	1) Perubahan Penggunaan Lahan Menjadi Pemukiman	1) Kondisi Indeks Kinerja Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pontianak	1) Pontianak berada pada ketinggian sekitar 0,8–1,5 mdpl, meningkatkan kerentanan dengan adanya dominasi

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

- Subbab 2.5, Gambar 2.26 (Hal II-60) 2) Pertumbuhan Ekonomi Mendorong Perubahan Tata Guna Lahan - Subbab 2.5 (Hal II-61)	- Subbab 2.5, Tabel 2.28 (Hal II-62) 2) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah menegaskan perkembangan permukiman tanpa pengendalian dapat menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan 3) Terdapat kegiatan usaha di sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, tidak sesuai	- Subbab 2.5, Tabel 2.30 (Hal II-64) 2) Terjadinya Genangan akibat curah hujan yang tinggi dan sistem drainase belum bisa menampung limpasan 3) Peningkatan capaian RTH di kota Pontianak - Subbab 2.5, Tabel 2.31 (Hal II-65)	kawasan terbangun pada lahan dataran rendah dan gambut 2) Pemanfaatan lahan yang melampaui kemampuan lingkungannya akibat adanya perubahan fungsi lahan yang mengurangi keberadaan ruang terbuka hijau 3) Berkurangnya lahan terbuka dan meningkatnya kawasan terbangun menyebabkan kemampuan lahan dalam meresapkan air hujan semakin menurun. 4) Jika kapasitas sistem drainase tidak memadai, maka potensi genangan dan banjir di wilayah perkotaan akan semakin meningkat. - Subbab 2.5 (Hal II-65 sd. II-66)
--	---	--	---

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

	dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2021–2041, yang mengarahkan kawasan sempadan sungai sebagai jalur hijau dan jalan paralel di sepanjang bantaran sungai - Subbab 2.5 (Hal II-62) 4) Pembangunan Jaringan Jalan Perkotaan - Subbab 2.5, Tabel 2.29 (Hal II-63)		
--	--	--	--

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Pemerintah Kota Pontianak telah menetapkan arahan pengelolaan ruang melalui RTRW Kota Pontianak Tahun 2013–2033. Pada peta rencana struktur ruang, pengembangan wilayah diarahkan melalui pengaturan pusat-pusat pelayanan, jaringan jalan, dan sistem prasarana kota agar perkembangan kawasan terbangun tetap berlangsung secara terarah dan sesuai dengan fungsi ruangnya. - Subbab 2.5, Gambar 2.27 (Hal II-68)	1) Memberikan pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan berupa pengawasan, pembinaan, dan labelisasi kegiatan usaha - Subbab 2.5 (Hal II-60)	1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013–2033, pengembangan kawasan lindung, ruang terbuka hijau, dan sempadan sungai. - Subbab 2.5, Tabel 2.33 (Hal II-69) 2) Pengembangan Rencana Jaringan Drainase melalui RTRW Kota Pontianak Tahun 2013–2033. - Subbab 2.5, Tabel 2.28 (Hal II-70)	1) Realisasi Kegiatan Penghijauan 2) Penguatan konsep kota hijau, perlindungan sempadan Sungai Kapuas dan Sungai Landak, serta optimalisasi pemenuhan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. - Subbab 2.5, Tabel 2.32 (Hal II-67)

1.1.6 Pengelolaan Sampah dan Limbah

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Timbulan Sampah - Subbab 2.6, Tabel 2.34, Gambar 2.29 (Hal II-72) 2) Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan Limbah Usaha - Subbab 2.6, Tabel 2.35, Tabel 2.36 (Hal II-74) 3) Sumber Timbulan Sampah Tersebar Akibat Pusat Kegiatan Ekonomi - Subbab 2.6 (Hal II-75)	1) Meningkatnya timbulan sampah perkotaan dan beban layanan persampahan 2) TPA dengan metode <i>open dumping</i> beralih ke <i>sanitary landfill</i> yang lebih ramah lingkungan. 3) Karakteristik sampah yang semakin beragam menyulitkan proses pengolahan. 4) Masih rendahnya pengelolaan sampah dari sumber dan masih adanya praktik	1) Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPNS) sebanyak 23% sampah di Kota Pontianak sudah terkelola sementara sisanya belum terkelola dengan baik - Subbab 2.6, Tabel 2.32 (Hal II-67) 2) Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Pemerintah Kota Pontianak - Subbab 2.6, Tabel 2.38 (Hal II-70) 3) Kondisi Capaian Pengurangan dan Daur Ulang Sampah dilakukan melalui berbagai	1) Pengelolaan yang baik mampu mengurangi potensi pencemaran tanah, air, dan udara di wilayah perkotaan. 2) Pengurangan sampah Tabel 2.38 sudah berkontribusi dalam mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA namun belum sepenuhnya mengurangi tekanan sistem persampahan di Kota Pontianak. 3) Keberadaan bank sampah, TPS3R, Pusat Olah Organik, dan pengepul/lapak telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan sampah, namun dampak positif pengurangan sampah belum sepenuhnya mampu menyeimbangi

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

	pembuangan yang tidak sesuai ketentuan. 5) Aspek sanitasi permukiman turut memberikan tekanan terhadap lingkungan. - Subbab 2.6, Tabel 2.37 (Hal II-77) 6) Pengelolaan limbah cair pada badan usaha umumnya sudah memiliki landasan pengaturan dan kewajiban penyediaan IPAL, namun pada kawasan permukiman, belum dikelola dan dialirkan ke saluran drainase, parit, atau badan air.	fasilitas pengelolaan yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. - Subbab 2.6, Tabel 2.39 (Hal II-80)	besarnya timbulan sampah kota dan tekanan terhadap sistem pengelolaan secara keseluruhan. 4) Pengelolaan limbah cair domestik dan kegiatan usaha yang lebih baik memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan perairan Kota Pontianak. - Subbab 2.6 (Hal II-81 sd. II-82) 5) Pengelolaan sampah dan limbah perkotaan yang belum tertangani dengan baik dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan. - Subbab 2.6, Tabel 2.40 (Hal II-82)
--	--	--	--

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

	- Subbab 2.6 (Hal II-77)		
<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan 2) Inovasi GALAH BUNG SAM di Sekolah melalui Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 859/BAPPEDA/Tahun 2024 - Subbab 2.6, Gambar 2.38 (Hal II-92) 3) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	1) Melaksanakan Pengurangan Sampah Melalui Pembatasan Timbulan Sampah - Operasional Penyapuan Kebersihan Jalan Kota - Pengaturan Waktu Pembuangan Sampah - Subbab 2.6 (Hal II-90) 2) Pengelolaan Limbah Cair dengan SPALD-T. - Subbab 2.6 (Hal II-94)	1) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota - Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 43 Tahun 2024 tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha. - Subbab 2.6, Gambar 2.27 (Hal II-91) 2) Penanganan Sampah melalui pemilahan dan pengolahan	1) Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah - Subbab 2.6, Gambar 2.31 (Hal II-84) 2) Melaksanakan Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA / TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional - Subbab 2.6 (Hal II-90) 3) Melaksanakan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Koordinasi Rencana Sistem Penanganan Sampah Tepian Sungai - Melakukan kegiatan Pendampingan TPA - Subbab 2.6 (Hal II-92)		sampah di instalasi pengolahan sampah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan - Pembinaan, Sosialisasi, dan BimTek Bank Sampah - Subbab 2.6, Tabel 2.41, Gambar 2.32 (Hal II-84) - Pengelolaan Sampah melalui TPST/TPS3R dengan Metode 3R - Subbab 2.6, Tabel 2.42, Gambar 2.33 (Hal II-87) - Pengelolaan Sampah Organik dengan Metode Biodigester - Subbab 2.6, Gambar 2.34 (Hal II-88)	- Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan LB3 melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 - Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 4) Keberadaan Perusahaan Pengelola Limbah B3
--	--	---	--

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

		- Pengelolaan Sampah Organik dengan Metode Pengomposan - Subbab 2.6, Gambar 2.35 (Hal II-89) - Pengelolaan Sampah Plastik dengan Metode Pirolisis - Subbab 2.6, Gambar 2.36 (Hal II-89)	- Subbab 2.6, Tabel 2.43 (Hal II-93)
--	--	---	--

1.1.7 Perubahan Iklim

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Mendorong Peningkatan Kebutuhan Energi - Subbab 2.7, Gambar 2.39 (Hal II-95)	1) Penggunaan Bahan Bakar Sektor Industri Hasilkan Emisi GRK - Subbab 2.7, Gambar 2.4 (Hal II-97) 2) Emisi GRK Oleh Berbagai Sektor di Kota Pontianak	1) Pola Curah Hujan Tinggi Kondisi ini dapat memengaruhi sistem drainase perkotaan dan meningkatkan potensi genangan, terutama pada bulan dengan curah hujan yang tinggi.	1) Dampak perubahan iklim juga terlihat melalui kejadian bencana di Kota Pontianak pada Tahun 2025, terutama cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan di beberapa kecamatan. Kejadian tersebut menunjukkan adanya area terdampak dan korban terdampak

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

2) Peningkatan Aktivitas Ekonomi Sebabkan Emisi Sektor Transportasi - Subbab 2.7 (Hal II-95)	- Subbab 2.7, Tabel 2.46 (Hal II-98)	- Subbab 2.7, Tabel 2.47 (Hal II-99)	dan telah menimbulkan konsekuensi nyata terhadap wilayah dan masyarakat. - Subbab 2.7, Tabel 2.5 (Hal II-101)
3) Perubahan Penggunaan Lahan Mengurangi Area Resapan Tanah - Subbab 2.7, Tabel 2.11 (Hal II-96)	3) Perubahan Struktur Lahan Mengurangi Penyerapan Limpasan Permukaan - Subbab 2.7 (Hal II-98)	2) Suhu Udara Perkotaan Meningkat Akibat Pemansan Global kecenderungan peningkatan suhu yang berdampak pada kondisi iklim mikro di Kota Pontianak - Subbab 2.7, Tabel 2.48 (Hal II-100)	2) Kejadian karhutla di Kota Pontianak tahun 2025 mengalami peningkatan pada Juli–Agustus yang terjadi pada lahan semak dan gambut, bahkan di beberapa lokasi mendekati permukiman.
4) Pertumbuhan Ekonomi Sebabkan Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor - Subbab 2.7, Tabel 2.45 (Hal II-96)		3) Kondisi perubahan iklim di Kota Pontianak tercermin dari tingkat kerentanan wilayah terhadap beberapa bencana terkait iklim. Seluruh kecamatan di Kota Pontianak berada pada tingkat kerentanan sedang terhadap	3) Pada Juli 2025, kualitas udara di Pontianak menurun akibat kabut asap karhutla dan nilai ISPU berada pada kategori Tidak Sehat. 4) Bencana banjir rob di Kota Pontianak pada Desember 2025 menimbulkan dampak berupa terendahnya permukiman di kawasan pesisir, dataran rendah, dan tepian sungai,

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

		banjir dan cuaca ekstrem (angin kencang), sedangkan untuk kebakaran hutan dan lahan terdapat 3 kecamatan dengan tingkat kerentanan tinggi. - Subbab 2.7, Tabel 2.49 (Hal II-100)	menyebabkan gangguan lalu lintas pada ruas-ruas jalan terdampak, menghambat mobilitas warga dan aktivitas perkotaan secara umum. 5) Cuaca ekstrem yang terjadi di Pontianak tahun 2025 menimbulkan dampak berupa kerusakan rumah warga, pohon tumbang, dan gangguan pada kawasan permukiman. 6) Dampak pada sektor pertanian, yaitu merusak lahan hortikultura dan memengaruhi ratusan petani di Pontianak Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cuaca ekstrem juga mengganggu aktivitas masyarakat dan mata pencaharian warga. - Subbab 2.7 (Hal II-102)
--	--	--	---

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Program Kampung Iklim (ProKlim) di beberapa lokasi, yaitu di Kecamatan Pontianak Barat dan Pontianak Utara. Kegiatan ini tersebar pada lima lokasi dengan cakupan luas yang bervariasi, mulai dari 5 Ha hingga 100 Ha. - Subbab 2.7, Tabel 2.52, Gambar 2.42 (Hal-107)	1) Pengurangan Emisi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Kota Pontianak dilakukan terutama pada pengelolaan persampahan melalui operasionalisasi bank sampah, serta didukung oleh beberapa tindakan di sektor transportasi. - Subbab 2.7, Tabel 2.51, Gambar 2.41 (Hal II-106)	1) Peningkatan ruang terbuka hijau dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas serapan karbon dan memperbaiki kualitas lingkungan dalam mitigasi perubahan iklim yang terjadi di Kota Pontianak - Subbab 2.7, Tabel 2.53 (Hal II-108)	1) Capaian RTH Kota Pontianak Tahun 2025 adalah 31.35% yang artinya telah melebihi target 31.33% yang sudah ditetapkan - Subbab 2.7, Tabel 2.54 (Hal II-108)

1.1.8 Resiko Bencana

<i>Driving Force</i>	<i>Pressure</i>	<i>State</i>	<i>Impact</i>
1) Pertumbuhan Penduduk Meningkatkan Kepadatan Pemukiman Hingga Sempadan Sungai - Subbab 2.8, Tabel 2.55, Gambar 2.43 (Hal II-110) 2) Perubahan Penggunaan Lahan Sebabkan Berkurangnya Area Resapan Tanah - Subbab 2.8, Tabel 2.56, Gambar 2.43 (Hal II-111)	1) Perkembangan Pemukiman Hingga Sempadan Sungai Meningkatkan Kerentanan Terhadap Genangan Air/Banjir 2) Perubahan Iklim Sebabkan Kenaikan Muka Air Laut dan Perubahan Pola Curah Hujan - Subbab 2.8 (Hal II-111 sd. 112)	1) Indeks Resiko Bencana Kota Pontianak menunjukkan tingkat kerentanan Kota Pontianak terhadap bencana karhutla, banjir (genangan), dan cuaca ekstrim (angin kencang), memiliki nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 50,09 dengan Kategori Sedang. - Subbab 2.8, Tabel 2.57 (Hal II-112) 2) Kondisi kebencanaan di Kota Pontianak tahun 2025 menunjukkan 109 kejadian dengan 451 korban terdampak. Jenis bencana yaitu Kebakaran pemukiman, Cuaca Ekstrim	3) Kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, serta letak geografis Kota Pontianak yang didominasi dataran rendah dan dikelilingi aliran sungai meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan angin puting beliung. 4) Kejadian karhutla di Kota Pontianak tahun 2025 mengalami peningkatan pada Juli–Agustus sehingga menimbulkan asap yang mempengaruhi kualitas udara. 5) Pada Juli 2025, kualitas udara di Pontianak menurun akibat kabut asap karhutla dan nilai ISPU berada pada kategori tidak sehat. 6) Bencana banjir rob di Kota Pontianak pada Desember 2025 menimbulkan

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

		(Angin Knejang), Kebakaran Hutan dan Lahan, dan sejumlah kecil bencana lainnya. - Subbab 2.8, Tabel 2.58 (Hal II-114)	dampak berupa terendahnya permukiman di kawasan pesisir, dataran rendah, dan tepian sungai, serta mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. 7) Cuaca ekstrem yang terjadi di Pontianak tahun 2025 menimbulkan dampak berupa kerusakan rumah warga, pohon tumbang, dan gangguan pada kawasan permukiman, terutama akibat angin puting beliung dan angin kencang. Selain itu, bencana ini juga berdampak pada sektor pertanian, yaitu merusak lahan hortikultura dan memengaruhi ratusan petani di Pontianak Utara. Kondisi tersebut menunjukkan juga mengganggu aktivitas masyarakat dan mata pencaharian warga.
--	--	---	--

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

			8) Rangkaian bencana yang terjadi menimbulkan konsekuensi berupa kerugian ekonomi, gangguan kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan. - Subbab 2.8 (Hal II-114 sd. 115)
<i>Response to Driving Force</i>	<i>Response to Pressure</i>	<i>Response to State</i>	<i>Response to Impact</i>
1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana perlu ditingkatkan, termasuk melalui pelatihan evakuasi dan penggunaan alat pemadam kebakaran. 2) Peningkatan peran serta, kesadaran, dan kesiapsiagaan masyarakat	1) Penataan tata ruang kota perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek kebencanaan, misalnya dengan membatasi pembangunan di area yang berisiko tinggi. - Subbab 2.8 (Hal II-116)	1) Upaya mitigasi bencana perlu ditingkatkan mengingat tingginya jumlah penduduk Kota Pontianak yang rentan terhadap ancaman banjir dan angin puting beliung. 2) Melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana, seperti daerah rawan banjir dan kebakaran lahan.	1) Pembentukan tim khusus pemadam kebakaran diperlukan untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi kebakaran. 2) Pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pembakaran lahan saat pembukaan lahan perlu dilakukan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan. - Subbab 2.8 (Hal II-116)

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

terhadap potensi bencana di Kota Pontianak. - Subbab 2.8 (Hal II-116)		- Subbab 2.8 (Hal II-116)	
--	--	---------------------------	--

1.2 Tabel Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
Isu Prioritas 1: Pengelolaan Sampah Perkotaan	Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi berdampak pada meningkatnya timbulan sampah setiap tahunnya (Sub bab 3.1.3, Hal III-4)	1) Peningkatan efektivitas pengelolaan sampah 2) Pengembangan fasilitas pengelolaan sampah (Sub bab 3.1.5, Hal III-11)	1) GALAH BUNG SAM 2) Memilah Sampah Menabung Emas 3) Si Gita Jas Berkerah (Sub bab 3.3, Hal III-37)	1) Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah 3) Surat Edaran Wali Kota Nomor	1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat 2) Pengurangan Sampah Plastik 3) Optimalisasi Pengelolaan Sampah disumbernya 4) Kolaborasi dengan Dunia Usaha (Sub bab 3.2, Hal III-30)

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
				43 Tahun 2024 Tentang Larangan Menyediakan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha 4) Pengembangan Bank Sampah 5) Rencana Alih Fungsi TPA Batu Layang menjadi TPST dalam Program LSDP (Sub bab 3.3, Hal III-41)	

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
Isu Prioritas 2: Penurunan Kualitas Air Permukaan	Kualitas air permukaan di Kota Pontianak menunjukkan kecenderungan penurunan akibat meningkatnya beban pencemar dari berbagai aktivitas (Sub bab 3.1.3, Hal III-4)	1) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 2) Program Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin	1) Pengembangan SIPEKA (Sistem Pemantauan Air) (Sub bab 3.3, Hal III-43)	1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air 2) Pemantauan Kualitas Air Secara Berkala 3) Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan	1) Meningkatnya perhatian terhadap pengelolaan lingkungan perairan 2) Adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Sub bab 3.2, Hal III-31)

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
		Lingkungan yang Dikeluarkan Daerah 4) Program peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pada bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemanusiaan (Sub bab 3.1.6, Hal III-17)		(Sub bab 3.3, Hal III-44)	
Isu Prioritas 3: Genangan Air Perkotaan	Perkembangan kawasan terbangun yang tidak	1) Peningkatan Kapasitas dan	1) Pengembangan sistem polder terpadu sebagai	1) Perda Kota Pontianak No. 10 Tahun 2018	1) Peningkatan infrastruktur drainase melalui

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
	diimbangi dengan penyediaan sistem drainase yang memadai serta berkurangnya area resapan air menyebabkan air hujan tidak dapat teralirkan secara optimal (Sub bab 3.1.3, Hal III-5)	Kinerja Sistem Drainase 2) Integrasi Sistem Drainase dengan Pengelolaan Tata Ruang 3) Peningkatan Infrastruktur Berbasis Konservasi Air 4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase (Sub bab 3.1.7, Hal III-25)	solusi pengendalian genangan melalui optimalisasi drainase, kolam retensi, tanggul, dan rumah pompa pada kawasan prioritas Kota Pontianak. 2) Pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase	Tentang Bangunan Gedung Pasal 34 Ayat 1 dan 3 tentang ketinggian (peil) bebas banjir. agar meninggikan lantai bangunan di kawasan sekurang-kurangnya ±40 cm dari muka jalan utama. 2) Pengelolaan dan Pengembangan	pembangunan, rehabilitasi, dan normalisasi saluran telah meningkatkan kapasitas aliran serta mengurangi hambatan akibat sedimentasi dan sampah. 2) Operasional sistem pengendali air seperti pompa, pintu air, serta pembangunan turap dan sheet pile berkontribusi dalam mengendalikan muka

BUKU I – RINGKASAN EKSEKUTIF

DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (SLHD)

KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

Isu Prioritas	Alasan Penetapan	Response			Pencapaian/Realisasi pada Tahun Kajian/ Pelaporan
		Program Penanganan	Program Inovasi	Kebijakan Penanganan	
			3) Pembersihan dan normalisasi saluran (Sub bab 3.3, Hal III-46)	Sistem Drainase Perkotaan 3) Operasi dan Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase 4) Normalisasi dan Rehabilitasi Saluran Drainase 5) Pelibatan Masyarakat melalui Program Kebersihan Lingkungan (Sub bab 3.3, Hal III-46)	air dan mengurangi genangan pada lokasi prioritas. 3) Terjadi penurunan intensitas genangan dan peningkatan kelancaran aliran air pada beberapa kawasan, yang berdampak pada meningkatnya kenyamanan lingkungan dan kelancaran aktivitas masyarakat (Sub bab 3.2, Hal III-33)



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. Alianyang No. 7D Pontianak, Kalimantan Barat 78116

Telp. (0561) 8171726